

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga akan disampaikan beberapa rekomendasi baik untuk pemerintah, pedagang dan juga bagi pendidikan, serta usulan bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah PKL maupun tata ruang kota.

#### **A. Kesimpulan**

Karakteristik PKL di Kota Tasikmalaya yang terdiri atas karakteristik umum PKL, kurang dari setengahnya berumur 31-40 dan 41-50 tahun, jenis kelamin responden sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan sebagian kecil lainnya berjenis kelamin perempuan. Tingkat pendidikan responden kurang dari setengahnya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Sebagian besar berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya.

Karakteristik aktivitas PKL setengahnya telah berjualan lebih dari 10 tahun dan sebagian besar memiliki jumlah pekerja kurang dari 2 orang. Modal usaha kurang dari setengahnya memerlukan modal lebih dari Rp 2.000.000 dan penghasilan rata-rata perhari kurang dari setengahnya berpenghasilan kurang dari Rp.50.000 dan antara Rp 50.000-100.000. Kurang dari setengahnya merupakan pedagang non makanan, sarana berdagang kurang dari setengahnya menggunakan

warung tenda dan gelaran/dasaran. Lebih dari setengahnya PKL berjualan selama 5-8 jam. Sebagian besar dilakukan dengan cara menetap.

Karakteristik lokasi PKL, untuk ruang yang digunakan kurang dari setengahnya menempati trotoar dan badan jalan, sebagian besar pola penyebaran PKL memanjang mengikuti jalan raya. Status ruang yang digunakan lebih dari setengahnya memiliki izin dengan luas lahan yang digunakan kurang dari setengahnya memiliki luas kurang dari 2 m<sup>2</sup> dan antara 2-3 m<sup>2</sup>.

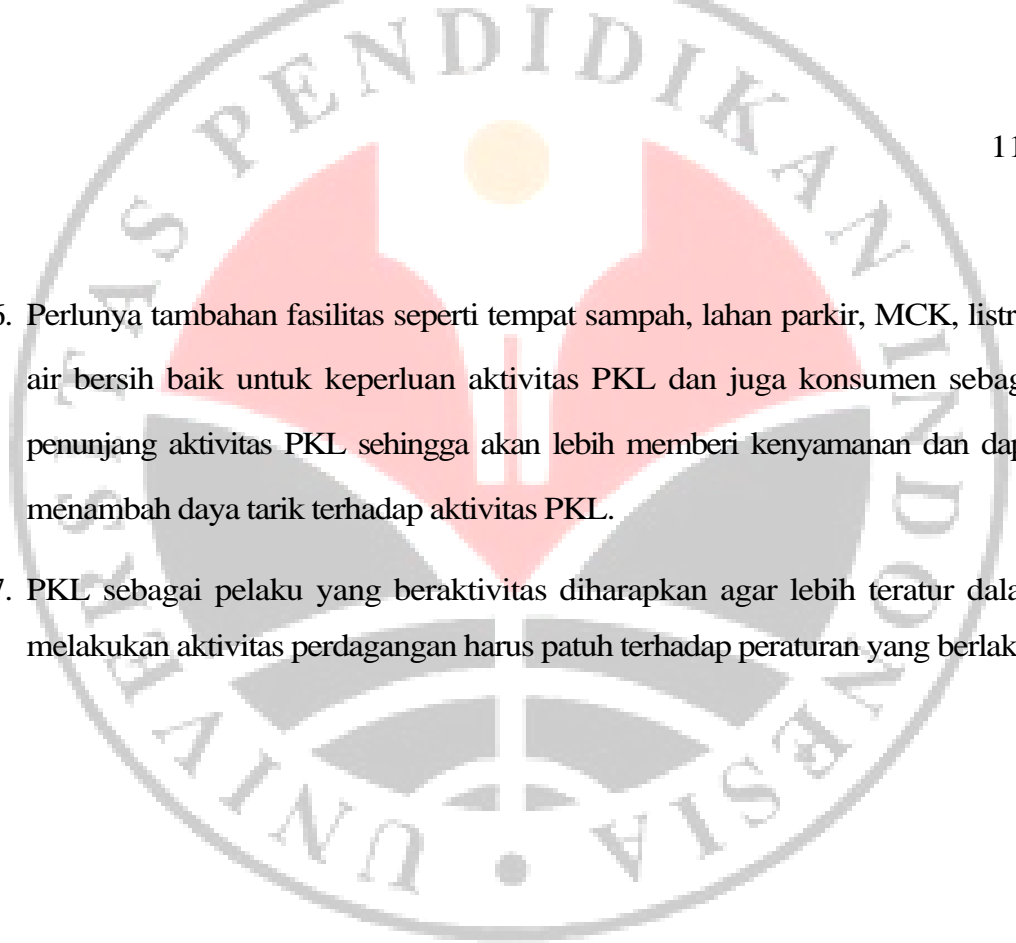
Alasan memilih lokasi berdagang lebih dari setengahnya menjawab karena ramai/sering dikunjungi pembeli, Kurang dari setengahnya menjawab biaya transportasi murah/dekat tempat tinggal. Sebagian kecil menjawab tingkat pendapatan yang memuaskan, lainnya seperti tidak ada lokasi lain, dan sudah ditetapkan pemerintah.

Keberadaan PKL dalam Rencana Pusat Pelayanan Sistem Kota Tasikmalaya keberadaan sektor informal dalam hal ini PKL menjadi fungsi penunjang untuk setiap BWK seperti di pusat kota, pusat BWK, pusat lingkungan, pusat pengembangan kegiatan wisata, pusat kegiatan industri, dan terminal sebagai penunjang aktivitas di BWK. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan ruang pemanfaatan jalan kecuali sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Keberadaan PKL di Kota Tasikmalaya lokasinya terletak di pusat kota dan pusat BWK. Lokasi tersebut merupakan arahan bagi sektor informal karena merupakan sarana penunjang bagi BWK.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memiliki rekomendasi dengan harapan dapat bermanfaat bagi pemerintah, PKL dan juga pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu juga mengakomodir keberadaan para PKL yang tersebar diberbagai tempat. Ini dikarenakan keberadaan PKL agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan serta dapat meningkatkan nilai guna ruang.
2. Sebagai salah sektor yang dapat menampung tenaga kerja, pemerintah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan ataupun pemberian modal kepada PKL agar dapat meningkatkan usaha PKL
3. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan pengaturan yang lebih rinci dalam hal penataan PKL seperti dalam hal lokasi, sarana fisik yang digunakan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aksesibilitas, fasilitas pendukung serta aspek-aspek penunjang aktivitas PKL sehingga dapat lebih meningkatkan keamanan, kenyamanan serta meningkatkan produktifitas PKL.
4. Perlunya penegakkan peraturan pemerintah yang terkait dengan PKL. Dikarenakan sering terjadi penyelewengan atau pelanggaran seperti lokasi yang seharusnya tidak dijadikan tempat untuk PKL malah sering dijadikan tempat berjualan PKL maupun sarana fisik dagangan yang digunakan untuk berjualan.
5. Pemerintah dan juga aparat yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) agar lebih arif dan bijaksana dalam perlakuan terhadap keberadaan PKL sehingga tidak terjadi perselisihan.

- 
6. Perlunya tambahan fasilitas seperti tempat sampah, lahan parkir, MCK, listrik, air bersih baik untuk keperluan aktivitas PKL dan juga konsumen sebagai penunjang aktivitas PKL sehingga akan lebih memberi kenyamanan dan dapat menambah daya tarik terhadap aktivitas PKL.
  7. PKL sebagai pelaku yang beraktivitas diharapkan agar lebih teratur dalam melakukan aktivitas perdagangan harus patuh terhadap peraturan yang berlaku.